

TESIS

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DI KAWASAN TIMUR INDONESIA TAHUN 2015-2020**

**THE EFFECT OF REGIONAL GOVERNMENT EXPENDITURES
ON REGIONAL DEVELOPMENT INEQUALITY IN EASTERN
INDONESIA,2015-2020**

VIQRA RAMADANTI

A032202003



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2022

TESIS

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DI KAWASAN TIMUR INDONESIA TAHUN 2015-2020**

Disusun dan Diajukan Oleh

VIQRA RAMADANTI

A032202003



Kepada

**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2022

TESIS

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI KAWASAN TIMUR
INDONESIA (2015 – 2020)**

Disusun dan diajukan oleh

**VIQRA RAMADANTI
A032202003**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal **05 Desember 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Agusafim, S.E., M.Si
NIP. 9670817 199103 2 006

Pembimbing Pendamping



Dr. Sultan Sulaim, S.E., M.Si
NIP. 19691217 199903 1 002

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan



Dr. Indrawati Tri Abdirevans, S.E., MA., CWMP
NIP. 19651012 199903 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si, CIPM
NIP. 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viqra Ramadanti

Nim : A032202003

Program Studi : Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI KAWASAN TIMUR INDONESIA TAHUN 2015-2020

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/terbitkan sebelumnya, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70)

Makassar, 05 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Viqra Ramadanti

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya untuk Allah SWT, dzat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang tak henti-hentinya memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh ummat manusia. Berkat izin-Nya pulalah penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kawasan Timur Indonesia”. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sang pejuang kemanusiaan, pembela kaum tertindas, yang telah menjadi suri teladan umat menuju gerbang pencerahan, semoga kelak penulis mampu mengikuti jejak perjuangan Beliau. Aamiin.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari fakta yang menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan wilayah pada umumnya mempunyai masalah yaitu timbulnya adanya ketimpangan yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya dan proses dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Sehingga peneliti tertarik untuk menyumbang konsep untuk menyikapi permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan fiskal, dimana pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur sebagai varia bel dependennya.

Tesis ini merupakan sebuah karya penulis yang masih jauh dari sempurna, sebuah tulisan yang bahkan oleh penulis sendiripun tak akan menyangkal untuk mengakuinya sebagai sebuah karya yang belum layak

baca. Akan tetapi sebagai sebuah proses awal, penulis berharap tulisan ini mampu memberikan banyak pelajaran dan mampu menjadi pemantik semangat dalam melahirkan karya-karya selanjutnya. Karya yang mendidik, karya yang jujur, dan tentu saja karya yang telah layak baca. Harapan itu tidak hanya untuk penulis sendiri tapi untuk para pembaca sekalian, baik yang sengaja maupun yang secara tak sengaja membaca tesis ini.

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan tesis ini, dan hanya berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihaklah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Dr. Agussalim, SE., M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Sultan Suhab, SE., M. Si sebagai Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingannya yang diberikan selama menyelesaikan tesis ini.

Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program S2, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi Unhas, Prof Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. beserta Para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unhas. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program S2 Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin dan kepada seluruh tim penguji, Drs. Muhammad Yusri Zamhuri., MA, Ph.D., Dr. Abd.Rahman Razak, SE.,M.Si., Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., dan Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE.,MA.,CWM® selaku Ketua Prodi

Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan yang telah meluangkan waktu dalam meneliti keabsahan dan memberikan kritik serta saran yang sangat berguna atas penyempurnaan tesis ini. Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh staf akademik Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan urusan-urusan akademik.

Terima kasih kepada teman-teman Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan dan Ekonomi Sumber Daya Universitas Hasanuddin 2020, yang telah banyak membantu penulis yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan moril serta kerja samanya. Serta semangat dan doa yang tiada henti serta teman-teman dan para sahabat di Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Dengan penuh rasa hormat dan kepatuhan penulis mengucapkan terima kasih karena sangat bersyukur atas keikhlasan dan ketulusan Prof.Dr.Ir. Jasruddin, M. Si dan Dra. Soeprieni sebagai kedua orang tua penulis selama di Makassar yang selalu mendidik dan memberikan doa, nasehat, bimbingan serta perhatian kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan kedua orang tua, Ayahanda Hamsah M dan Ibunda Dahlia dalam mendidik, membesarkan dan mendoakan penulis serta selalu memberikan semangat dan bantuan

secara materi. Penulis juga sangat bersyukur dan merasa beruntung karena tidak hanya sebagai orang tua, keduanya juga sangat berperan dalam memberikan petunjuk, doa, saran, motivasi dan telah menitiskan niat dan ruh suci dan keikhlasan dalam menuntut ilmu sehingga penulis dapat mencapai cita- cita. Maha Suci Engkau Ya Allah tidaklah ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau telah beritahukan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala hikmah. Wallahu'alam.

Makassar,05 Desember 2022

Viqra Ramadanti

ABSTRAK

VIQRA RAMADANTI. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kawasan Timur Indonesia. (Dibimbing oleh Agussalim dan Sultan Suhab).

Adanya perbedaan sumber daya dan proses dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah menyebabkan kemampuan setiap daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda yang menimbulkan masalah terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, analisa mengenai ketimpangan pembangunan wilayah perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2020.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang dipakai adalah data panel, 12 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia selama 6 tahun (2015-2020). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Three Stage Least Square (3SLS)*. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Sedangkan, variabel pengeluaran pemerintah daerah bidang infrastruktur tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan wilayah.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah Daerah, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pembangunan Wilayah.



ABSTRACT

VIQRA RAMADANTI. The Effect of Regional Government Expenditures on Regional Development Inequality in Eastern Indonesia. (Supervised by Agussalim and Sultan Suhab).

The existence of differences in resources and processes in the implementation of a region's development causes each region's ability to encourage the development process also to be different, which causes problems in inequality development between regions. Therefore, an analysis of regional development disparities needs to be carried out. This study aims to analyze the effect of local government spending, the Human Development Index (HDI), and economic growth on regional development inequality in Eastern Indonesia in 2015-2020.

This research approach uses a quantitative approach. The data type used is panel data, 12 provinces in eastern Indonesia for six years (2015-2020). The method of data analysis used in the study is *Three Stage Least Square* (3SLS). The results show that variable expenditures for government-area field education and expenses for government-area field health take effect to index development human. In addition, variable index development man takes effect on a growth economy. Interim results show that variable expenditure on government area field education, government area field health expenses, index development people and growth economy affect regional inequality development. Meanwhile, variables expenditure government area field infrastructure no take effect to index development human, growing economy and regional inequality development.

Keywords: Regional Government Expenditure, HDI, Economic Growth, Regional Development Inequality.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kajian Teori dan Konsep	19
2.2. Hubungan Antar Variabel	43
2.3. Penelitian Terdahulu	58
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
3.1. Kerangka Konseptual	64
3.2. Hipotesis	67
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1. Rancangan Penelitian	70

4.2. Lokasi Penelitian	70
4.3. Populasi	71
4.4. Jenis dan Sumber Data.....	71
4.5. Metode Pengumpulan Data.....	72
4.6. Metode Analisis	72
4.7. Definsi Operasional Variabel.....	75
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Deskripsi Data	79
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian	95
5.3 Pembahasan	101
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	122
6.2 Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020	3
Tabel 1.2 Indeks Williamson Indonesia dan 12 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2020	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	58
Tabel 5.1 Indeks Williamson 12 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2020.....	80
Tabel 5.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi (Persen) di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2020.....	84
Tabel 5.3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2020.....	87
Tabel 5.4 Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan 12 Provinsi (Rupiah) di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2015-2020.....	89
Tabel 5.5 Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan 12 Provinsi (Rupiah) di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2015-2020.....	92
Tabel 5.6 Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur 12 Provinsi (Rupiah) di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2015-2020.....	95
Tabel 5.7 Hasil Estimasi Pengaruh Antar Variabel Independen Ke Variabel Dependen.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian	67
Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas.....	96
Gambar 5.2 Hasil Uji Multikolinearitas	97
Gambar 5.3 Hasil Uji Heteroskedasitas	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Mentah Penelitian	131
Lampiran 2: Data Dalam Ln	133
Lampiran 3: Hasil Regression	135

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa sebagai tujuan nasional (Bappeda Buleleng,2016). Namun, dalam proses pembangunan tersebut setiap wilayah atau daerah pada umumnya mempunyai masalah yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi. Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat maupun antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi karena adanya perbedaan sumber daya dan proses dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah (Sjafrizal,2012).

Adanya ketimpangan pembangunan ini salah satunya dikarenakan sistem pemerintahan Indonesia yakni sentralisasi dimana semua kewenangan ada di pemerintah pusat (Suhartono,2015). Sehingga, untuk mengurangi ketimpangan tersebut, maka sistem pemerintahan diubah menjadi sistem desentralisasi atau biasa disebut otonomi daerah. Dengan adanya system otonomi daerah maka muncul suatu kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Akan tetapi, sejak dilaksanakannya otonomi daerah pada tahun 2001, masih belum mampu

menyelesaikan permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal tersebut terjadi karena dalam pelaksanaannya, sistem otonomi daerah hanya mampu meningkatkan pertumbuhan daerah tanpa disertai dengan pemerataan pendapatan antar wilayah. Dengan kata lain, pelaksanaan desentralisasi fiskal disamping memacu pertumbuhan juga disertai dengan kesenjangan pendapatan antar wilayah (Sianturi,2011).

Kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan kawasan ekonomi yang berbasis kemaritiman. Berdasarkan Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) yang termasuk ke dalam Kawasan Timur Indonesia ada 12 provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Papua Barat.

Kawasan Timur Indonesia (KTI) dikenal lebih tertinggal dari segi pembangunan dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Kawasan Barat Indonesia dianggap lebih berkembang dibandingkan Kawasan Timur Indonesia (KIT) yang masih dalam tahap perkembangan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari proporsi sumbangan daerah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Kawasan Indonesia Barat menyumbangkan sekitar 75% dari total PDB nasional, sedangkan Kawasan Timur Indonesia hanya menyumbangkan kurang lebih 25% (Kementerian PUPR,2017).

Selain itu, ketertinggalan Kawasan Timur Indonesia (KTI) juga terlihat pada data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017 dari Badan Pusat Statistik (BPS) hanya dua provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki IPM Kategori tinggi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara dan hingga saat ini hanya Sulawesi Utara yang masuk dalam sepuluh besar IPM tertinggi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2015-2020 berikut.

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2015-2020

Provinsi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	69.45	70.00	70.60	71.19	71.90	71.99
Sumatera Utara	69.51	70.00	70.57	71.18	71.74	71.77
Sumatera Barat	69.98	70.73	71.24	71.73	72.39	72.38
Riau	70.84	71.20	71.79	72.44	73.00	72.71
Jambi	68.89	69.62	69.99	70.65	71.26	71.29
Sumatera Selatan	67.46	68.24	68.86	69.39	70.02	70.01
Bengkulu	68.59	69.33	69.95	70.64	71.21	71.40
Lampung	66.95	67.65	68.25	69.02	69.57	69.69
Kep. Bangka Belitung	69.05	69.55	69.99	70.67	71.30	71.47
Kep. Riau	73.75	73.99	74.45	74.84	75.48	75.59
Dki Jakarta	78.99	79.60	80.06	80.47	80.76	80.77
Jawa Barat	69.50	70.05	70.69	71.30	72.03	72.09
Jawa Tengah	69.49	69.98	70.52	71.12	71.73	71.87
Di Yogyakarta	77.59	78.38	78.89	79.53	79.99	79.97
Jawa Timur	68.95	69.74	70.27	70.77	71.50	71.71
Banten	70.27	70.96	71.42	71.95	72.44	72.45

Provinsi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bali	73.27	73.65	74.30	74.77	75.38	75.50
Kalimantan Barat	65.59	65.88	66.26	66.98	67.65	67.66
Kalimantan Tengah	68.53	69.13	69.79	70.42	70.91	71.05
Kalimantan Selatan	68.38	69.05	69.65	70.17	70.72	70.91
Kalimantan Timur	74.17	74.59	75.12	75.83	76.61	76.24
Kalimantan Utara	68.76	69.20	69.84	70.56	71.15	70.63
Nusa Tenggara Barat	65.19	65.81	66.58	67.30	68.14	68.25
Nusa Tenggara Timur	62.67	63.13	63.73	64.39	65.23	65.19
Sulawesi Utara	70.39	71.05	71.66	72.20	72.99	72.93
Sulawesi Tengah	66.76	67.47	68.11	68.88	69.50	69.55
Sulawesi Selatan	69.15	69.76	70.34	70.90	71.66	71.93
Sulawesi Tenggara	68.75	69.31	69.86	70.61	71.20	71.45
Gorontalo	65.86	66.29	67.01	67.71	68.49	68.68
Sulawesi Barat	62.96	63.60	64.30	65.10	65.73	66.11
Maluku	67.05	67.60	68.19	68.87	69.45	69.49
Maluku Utara	65.91	66.63	67.20	67.76	68.70	68.49
Papua Barat	61.73	62.21	62.99	63.74	64.70	65.09
Papua	57.25	58.05	59.09	60.06	60.84	60.44

Sumber BPS Indonesia 2015-2020

Berdasarkan tabel1.1 dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia selama tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia provinsi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, Indeks Pembangunan Manusia masih lebih tertinggal dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Pada tahun 2020 hanya Provinsi Sulawesi Utara yang masuk sepuluh besar IPM tertinggi di

Indonesia. Selain itu, pada tahun 2015-2017 hanya Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yang masuk dalam IPM kategori tinggi, hingga pada tahun 2018 sampai saat ini tahun 2020 Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dengan IPM kategori tinggi

Jadi, hingga saat ini hanya terdapat tiga provinsi Provinsi di Kawasan Timur Indonesia dengan IPM yang berada di kategori tinggi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan, wilayah yang berada di Pulau Maluku dan Papua masih berada dalam IPM kategori sedang dan berada pada posisi terendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu, perhatian pemerintah sangat diperlukan dalam hal melakukan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia yang diharapkan mampu menjadi langkah yang penting dan berpengaruh besar terhadap peningkatan IPM di wilayah Indonesia Timur.

Dalam mengatasi masalah tersebut maka pemerintah melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur dan pengembangan teknologi (Kementrian PUPR,2017). Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan antar provinsi yang terjadi di antar provinsi di Kawasan Timur Indonesia periode 2015-2020 dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan wilayah yaitu indeks ketimpangan Williamson. Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, dimana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut berada di tingkat

ketimpangan pembangunan rendah. Sedangkan, bila mendekati satu maka semakin tinggi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah tersebut (Sjafrizal,2012). Tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia dan 12 provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia dapat dilihat pada tabel indeks Williamson berikut:

Tabel 1.2
Indeks Williamson Indonesia dan 12 Provinsi
di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2020

Provinsi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indonesia	0.70	0.70	0.70	0.71	0.73	0.72
Nusa Tenggara Barat	0.85	0.82	0.86	0.67	0.65	0.77
Nusa Tenggara Timur	0.64	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46
Sulawesi Utara	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49
Sulawesi Tengah	0.50	0.52	0.56	0.58	0.62	0.65
Sulawesi Selatan	0.68	0.68	0.68	0.69	0.70	0.69
Sulawesi Tenggara	0.41	0.40	0.42	0.42	0.43	0.39
Gorontalo	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.19
Sulawesi Barat	0.38	0.36	0.36	0.35	0.34	0.33
Maluku	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
Maluku Utara	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
Papua Barat	0.62	0.61	0.67	0.67	0.66	0.69
Papua	0.81	0.82	0.82	0.83	0.85	0.87

Sumber: Data Diolah Penulis

Berdasarkan tabel Indeks Williamson diketahui bahwa tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia masih terbilang cukup tinggi ($>0,5$) dengan rata-rata ketimpangan pembangunan yaitu 0.71 selama periode 2015-2020. Sementara itu, tingkat ketimpangan

pembangunan tinggi ($>0,5$) di Kawasan Timur Indonesia terlihat berada pada Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan dengan rata-rata ketimpangan pembangunan yaitu 0,64. Sedangkan, Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara menunjukkan tingkat ketimpangan rendah ($<0,5$) selama periode 2015-2020 dengan rata-rata ketimpangan pembangunan yaitu 0,275. Hal ini menunjukkan bahwa 12 Provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia sebagian besar berada pada tingkat ketimpangan pembangunan yang tinggi.

Ketimpangan pembangunan setiap wilayah selalu memiliki perbedaan, maka dari itu perlu perhatian yang serius dari pemerintah untuk merealisasikan kembali, serta strategi apa yang dilakukan agar pemerataan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia dapat diwujudkan. Untuk dapat melaksanakan kebijakan yang dapat mengenai sasaran, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah. Menurut Sjafrizal (2012) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah yaitu adanya perbedaan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, dan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di suatu daerah, serta alokasi dana

pembangunan wilayah seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Berbagai indikator untuk memantau kemajuan di suatu daerah, baik indikator ekonomi maupun indikator sosial. Dalam konteks masyarakat sebagai obyek pembangunan, maka diperlukan indikator untuk mengukur perkembangan kehidupan atau tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk melihat tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi secara umum, indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Maka, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi yang diukur dari perbedaan kenaikan dan penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun tertentu dengan tahun sebelumnya (Todaro,2006).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pembangunan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka ketimpangan pembangunan suatu wilayah akan berkurang. Berdasarkan teori model pengembangan dari teori ekonomi modern yaitu model pertumbuhan endogen (*endogenous growth model*). Dalam model pertumbuhan endogen menekankan bahwa sumber daya manusia sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Trisnanto,2018). Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan

penduduk dalam menyerap dan mengelolah sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik (Hidayat,2012). Oleh sebab itu, pemerataan pembangunan juga akan semakin meningkat untuk mencapai kearah yang lebih baik dalam mengatasi ketimpangan pembangunan wilayah.

Ketertinggalan wilayah timur Indonesia terus mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yaitu pemerataan pembangunan khususnya percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia dan memperkecil kesenjangan antar wilayah di Indonesia (Bappenas,2019). Secara teoritis ketimpangan pembangunan wilayah dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dalam teori tersebut muncul sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Teori ini menjelaskan bahwa pada permulaan pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut menuju titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut dan berangsur-angsur ketimpangan pembangunan tersebut akan menurun. Berdasarkan, hipotesa tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada negara-negara sedang berkembang atau daerah yang sedang dalam tahap awal pembangunan umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara atau daerah maju yang

tingkat ketimpangan pembangunan wilayah cenderung lebih rendah (Sjafrizal,2012).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di wilayah timur Indonesia dapat dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Setiap daerah diberikan kebebasan dalam mengatur otonomi daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai distribusi besaran anggaran dalam sektor Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini turut diatur dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah otonom diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah berupa memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (DJPK KemenkeU RI,2020).

Peranan pemerintah yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui permintaan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi faktor pendorong perekonomian melalui program atau kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk mendorong produktivitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah.

Berdasarkan teori model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian pada tahap menengah dan tahap lanjut terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat (Prasetya,2012).

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik sebagai wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 49 ayat (1). Hal ini terlihat dari besaran anggaran pendidikan yang meningkat setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 anggaran pendidikan yakni Rp.505,8 triliun, anggaran pendidikan meningkat sebesar 29,6% terhadap anggaran pendidikan pada tahun 2015 yakni Rp.390,3 triliun (DJPk Kemenkeu RI,2020). Pengeluaran pembangunan pada sektor pendidikan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan

pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan pada akhirnya meningkatkan produksi.

Sedangkan, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Aspek kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas manusia. Untuk itu, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Dalam memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan Rp.132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, angka ini naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan pada tahun 2015 sebesar Rp.69,3 triliun (DJPK Kemenkeu RI, 2020). Hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembentukan modal manusia yang merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu daerah.

Sementara itu, Pembangunan infrastruktur yang merupakan asset fisik dalam menyediakan jasa dan digunakan untuk produksi dan konsumsi final meliputi *public utilities* (telekomunikasi, air, minum, sanitasi dan gas), *public works* (bendungan, saluran irigasi, dan drainase) serta sektor transportasi seperti jalan, kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan

terbang (Bank Dunia, 1994:12). Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi yang produktif, terciptanya lapangan kerja serta pengurangan kemiskinan. Sektor infrastruktur adalah salah satu dari lima fokus utama RAPBN 2020, sektor infrastruktur mendapat porsi senilai Rp.419,2 triliun, naik 4,9% dibandingkan alokasi anggaran 2029 sebesar Rp.399,7 triliun (DJPK Kemenkeu RI, 2021). Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengeluaran pemerintah infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan produktifitas masyarakat yang akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Maski (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah akan semakin mengurangi nilai Indeks Williamson yang berarti semakin meratanya pembangunan di Jawa Timur tahun 2007-2011. Penelitian yang dilakukan oleh Mandei, dkk (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan di Kota Bitung tahun 2020. Adapun hasil temuan penelitian oleh Baransano, dkk (2016) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh PDRB perkapita menunjukkan pengaruh terhadap ketimpangan dimana tingginya produktivitas tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah Papua Barat dengan keterampilan yang lebih baik telah memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan ketimpangan di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlu dilihat sejauh mana peran pemerintah melalui pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini realisasi dari anggaran belanja daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di 12 Provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia. Berdasarkan keadaan tersebut membuat suatu ketertarikan untuk mengamati pengaruhnya dengan mengangkat fenomena tersebut menjadi suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kawasan Indonesia Timur”.

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia.
2. Apakah pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia.

3. Apakah pengeluaran pemerintah daerah bidang infrastruktur berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia.
4. Apakah pengeluaran pemerintah daerah bidang infrastruktur berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.
5. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.
6. Apakah pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.
7. Apakah pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.
8. Apakah pengeluaran pemerintah daerah bidang infrastruktur berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.
9. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.
10. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah bidang infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah bidang infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah bidang infrastruktur terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.
9. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.
10. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dan menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi pembangunan.
2. Sebagai bahan acuan bagi peneliti yang berminat untuk meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pemerataan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia

3. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan positif dan membangun khususnya bagi pemerintah daerah di provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Praktis.

Dapat menjadi informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah di provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia dalam menentukan arah kebijakan bagi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori dan Konsep

2.1.1. Teori Pembangunan Ekonomi.

Istilah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi kadang-kadang digunakan secara bergantian, tetapi pada dasarnya keduanya berbeda. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada kenaikan pendapatan nasional atau per kapita. Jika produksi barang dan jasa di suatu negara meningkat, dengan cara apa pun, dan seiring dengan itu pendapatan rata-rata meningkat, negara tersebut telah mencapai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengapa persentase populasi dunia yang tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah, yang didefinisikan dalam GNI per kapita, telah turun begitu cepat selama tiga dekade terakhir. Pembangunan ekonomi menyiratkan lebih khususnya, perbaikan dalam kesehatan, pendidikan, dan aspek-aspek lain dari kesejahteraan manusia. Negara-negara yang meningkatkan pendapatannya tetapi tidak juga meningkatkan harapan hidup, meningkatkan pendidikan, dan memperluas peluang individu, kehilangan beberapa aspek pembangunan yang penting (Perkins, dkk 2013).

Pada umumnya, pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, taraf

pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi. Istilah ekonomi pembangunan mempunyai arti yang sangat berbeda seperti yang diterangkan di atas, tetapi pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan mempunyai hubungan yang sangat erat yaitu dimana ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang, yang seterusnya akan kita namakan negara berkembang saja, dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi (Sukirno, 2007)

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara tidak hanya diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan masyarakat. Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi saja. Namun setelah itu, banyak negara yang mulai menyadari bahwa pertumbuhan (*growth*) tidak identik dengan pembangunan (*development*). Artinya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat belum tentu pembangunan juga akan bertambah, akan tetapi

lebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh (Kuncoro, 1997 dalam Setiawan,2016).

Terdapat beberapa teori pembangunan yaitu teori pembangunan seimbang dan teori pembangunan tidak seimbang. Teori pembangunan seimbang yang dikemukakan oleh Rosenstein-Rodan dan Ragnar Nurkse yang beranggapan bahwa dalam menciptakan pembangunan seimbang, harus dilakukan pembangunan berbagai jenis industri yang saling berkaitan, sehingga setiap industri akan memperoleh eksternalitas ekonomi. Cara yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan penanaman modal pada waktu bersamaan di industri yang memiliki keterkaitan. Sehingga, hal ini akan memperluas kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, serta terjadinya perluasan pasar (Simangunsong,2001).

Sedangkan berdasarkan teori pembangunan tidak seimbang yang dikemukakan oleh Kindleberge, H.W. Singer, dan A. Hirschman yang bertentangan dengan teori pembangunan seimbang. Teori ini berpendapat bahwa tidak ada negara berkembang yang memiliki modal dan sumber daya yang cukup untuk melakukan investasi pada semua sektor. Sehingga, investasi seharusnya dilakukan pada beberapa sektor atau industri terpilih agar cepat berkembang dan hasil tersebut dapat digunakan untuk membangun sektor lain serta menghasilkan peluang investasi yang baru (Simangunsong,2001).

Berdasarkan teori tersebut, terdapat persamaan dalam pembangunan yaitu berhubungan dengan peran negara/pemerintah dan

peran sumber daya manusia yang berkualitas serta peranan modal. Sehingga, dalam proses pembangunan, diperlukan peranan pemerintah serta adanya modal untuk investasi agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai potensi daerahnya.

2.1.2. Ketimpangan Pembangunan Wilayah

1. Definsi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibatnya, kemampuan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Sehingga tidak mengherankan jika setiap daerah terdapat wilayah relatif maju dan wilayah relatif terbelakang (Sjafrizal,2012).

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu daerah bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang melihat ketimpangan antar kelompok masyarakat, sedangkan ketimpangan pembangunan antar wilayah melihat perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah. Sehingga, hal yang diperdebatkan bukan antara kelompok kaya dan miskin namun antara daerah maju dan terbelakang.

2. Teori Ketimpangan Pembangunan Wilayah

a) Hipotesis Neo-Klasik (Doughlas C. North)

Menurut Hipotesis Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur ketimpangan pembangunan antar wilayah akan menurun. Berdasarkan hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada awal pembangunan suatu negara sedang berkembang, umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sementara pada negara maju ketimpangan akan menjadi lebih rendah (Sjafrizal,2012).

Hipotesis Neo-Klasik juga berpendapat bahwa mobilitas faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Sehingga, modal dan tenaga ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju dan ketimpangan pembanguna wilayah cenderung melebar. Namun, bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baik sarana dan prasarana, maka mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin lancar. Sehingga, setelah negara tersebut sudah maju, maka ketimpangan regional secara bertahap akan berkurang (Sjafrizal,2012).

Sehingga, dari hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja

berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Kemudian, pada permulaan proses pembangunan, ketimpangan regional cenderung meningkat, tetapi setelah mencapai titik maksimum bila pembangunan dilanjutkan, maka ketimpangan regional akan berkurang.

b) Teori Pusat Pertumbuhan Pertumbuhan (Perroux)

Ide awal tentang pusat pertumbuhan (growth poles) pada awalnya dikemukakan oleh Francois Perroux pada tahun 1955. Menurut Perroux transfer pertumbuhan ekonomi antar daerah umumnya tidak lancar, tetapi cenderung terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu yang mempunyai keuntungan lokasi. Daerah di sekitar pusat pertumbuhan merupakan wilayah pengaruh dan pertumbuhannya. Pemikiran Perroux tentang adanya konsentrasi kegiatan industri pada daerah tertentu yang kemudian dapat mendorong pusat pertumbuhan (Sjafrizal,2012).

Pandangan ini kemudian juga didukung oleh Hirschman (1958) yang mengidentifikasi adanya daerah tertentu yang bertumbuh sangat cepat (*growing point*) dan ada pula yang bertumbuh sangat lambat (*lagging regions*). Hal ini terjadi karena dalam proses pembangunan terdapat efek rembesan (*trickling-down effect*) dan efek konsentrasi (*polarization effect*) yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya (Sjafrizal,2012).

Berdasarkan interpretasi spasial yang dikemukakan beberapa ahli terhadap konsep pertumbuhan seperti Myrdal (1957), Boudville (1966), Friedman (1972), Muta'ali (1999:3) dapat disimpulkan bahwa pusat pertumbuhan dapat mendorong *spread effect* atau *trickle down effect* dan *backwash effect* atau *polarization effect* terhadap daerah di sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif terhadap perkembangan daerah sekitarnya disebut *spread effect*. Contohnya, seperti terbukanya kesempatan kerja, banyaknya investasi yang masuk, upah buruh semakin tinggi, dan penduduk dapat memasarkan bahan mentah. Sedangkan pengaruh negative disebut *backwash effect*. Contohnya, adalah adanya ketimpangan wilayah, kriminalitas dan kerusakan wilayah meningkat (Kuncoro,2019).

Pusat pertumbuhan memiliki karakteristik utama yaitu sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu, konsentrasi kegiatan ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut terdapat sebuah industri induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi. Adanya pusat pertumbuhan di suatu wilayah dapat mengakibatkan ketimpangan antar wilayah, apabila pusat pertumbuhan tersebut tidak memberikan dampak terhadap wilayah lain di sekitarnya. Sehingga, proses pertumbuhan dan pembangunan yang tinggi hanya terjadi di wilayah pusat

pertumbuhan, sementara wilayah lain yang bukan merupakan pusat pertumbuhan, memiliki perekonomian yang rendah (Sjafrizal,2012).

3. Penyebab Ketimpangan Pembangunan Wilayah.

Menurut Sjafrizal (2012) penyebab ketimpangan wilayah yaitu sebagai berikut:

a) Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam cukup banyak akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih sedikit. Maka, hal tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih sedikit, maka biaya produksi barang dan jasa akan lebih tinggi dan daya saing menjadi lemah sehingga hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih lambat. Dengan demikian, perbedaan sumber daya alam ini dapat mendorong ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi lebih tinggi.

b) Perbedaan kondisi demografis

Kondisi demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat

pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, serta perbedaan etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah. Daerah dengan kondisi demografi yang baik akan cenderung memiliki tingkat produktivitas kerja yang lebih tinggi. Kemudian, kondisi tersebut akan mendorong investasi ke daerah yang bersangkutan dan meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika kondisi demografis daerah kurang baik, maka tingkat produktivitas kerja masyarakat rendah dan hal ini kurang menarik bagi investor sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat berdasarkan kuantitas, akan tetapi perlu dilihat dari segi kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

c) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa.

Ketika mobilitas barang dan jasa di suatu daerah kurang lancar akibat dari infrastruktur yang tidak memadai, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Hal ini juga berlaku ketika migrasi kurang lancar, dimana ketika suatu daerah memiliki kelebihan tenaga kerja, maka tenaga kerja tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan. Sehingga, ketimpangan ekonomi antar wilayah akan cenderung lebih tinggi karena kelebihan suatu daerah

tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan dan daerah terbelakang sulit mendorong kegiatan ekonominya.

d) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah akan mempengaruhi ketimpanagan ekonomi antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat pada daerah yang terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi lebih besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Sebaliknya, jika konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah selanjutnya akan mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu terdapat sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, lebih meratanya fasilitas transportasi baik darat, laut, dan udara, kemudian yang terakhir yaitu kondisi demografis dengan kualitas yang lebih baik dan kuantitas yang mencukupi.

e) Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Daerah yang mendapatkan alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah atau dapat menarik investor swasta ke daerahnya, maka akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan mendorong pembangunan daerah yang bersangkutan melalui penyediaan

lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah tertentu ternyata lebih rendah, maka kegiatan ekonomi dan pembangunan daerahnya kurang berkembang baik.

4. Pengukuran Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Terdapat beberapa cara dalam menentukan pembangunan antar wilayah dalam suatu negara atau daerah. Tingkat Pembangunan Wilayah dapat diukur dengan menggunakan Indeks Williamson. Indeks ini dikembangkan oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1965. Williamson meneliti hubungan disparitas daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi (Sjafriza,2012). Formula Indeks Williamson bisa dituliskan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 \frac{F_i}{n}}}{Y}$$

Keterangan:

Y_i = PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di daerah i

Y = rata-rata PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di daerah

F_i = jumlah penduduk di daerah i

n = jumlah penduduk daerah keseluruhan.

Kriteria Indeks Williamson menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- Jika $IW < 0,5$ \diamond Ketimpangan rendah.
- Jika $IW \geq 0,5$ \diamond Ketimpangan tinggi.

Selain menggunakan Indeks Williamson, dalam mengukur suatu ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan Indeks Theil. Konsep Entropi Theil dari suatu distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industry (Kuncoro,2004). Adapun formula Indeks Entropi Theil sebagai berikut:

$$I(y) = \sum \left(\frac{Y_i}{Y} \log \left[\left(\frac{Y_i}{Y} \right) / \left(\frac{X_i}{X} \right) \right] \right)$$

Keterangan:

Y_i = PDRB per kapita wilayah i

Y = PDRB per kapita wilayah referensi

X_i = jumlah penduduk wilayah i

X = jumlah penduduk provinsi

Apabila indeks Theil mendekati 1 maka terjadi ketimpangan yang semakin besar dan apabila Indeks Theil mendekati 0 maka ketimpangan semakin mengecil atau semakin rata. Akan tetapi, pada umumnya metode yang lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilakukan melalui Indeks Williamson. Hal ini dikarenakan metode ini terbilang cukup mudah dan praktis untuk mengukur ketimpangan antar wilayah.

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Sukirno (2011) bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sedangkan menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang dan jasa, sekaligus semakin banyak jenis barang-barang ekonomi di penduduknya dalam pertumbuhan ekonomi memiliki 3 (tiga) komponen didalamnya antara lain meningkatnya persediaan barang secara terus menerus, teknologi maju, dan penggunaan teknologi disesuaikan dengan kondisi kelembagaan dan ideologis suatu negara (Jhingan,2013).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur penting yang harus dilakukan dalam pembangunan ekonomi daerah. Bahkan hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi tinggi merupakan sasaran utama dalam rencana pembangunan. Melalui pertumbuhan ekonomi tinggi, diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dapat pula ditingkatkan (Aswuriyani,2020). Sehingga, dalam era otonomi,

masing-masing daerah bersaing meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mendorong kemakmuran masyarakat setempat.

Pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menghitung peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu ke tahun berikutnya. Untuk menghindari kenaikan harga dalam perhitungan, maka data yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga konstan bukan atas dasar harga berlaku (Sjafrizal, 2012).

2. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan, jika output yang dihasilkan di tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Jhingan (2012) pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi perekonomian karena tersedianya sumber daya alam yang potensial akan menjamin berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara lancar. Namun, sumber daya alam yang melimpah saja belum cukup untuk menunjang perekonomian, masih harus dilengkapi dengan fasilitas pengolahan, pemasaran, transportasi dan sumber daya manusia yang mampu mengolah serta memanfaatkannya

b) Organisasi

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi dan merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitas. Organisasi juga berkaitan dengan para wiraswasta yang tampil sebagai organisator dan berfungsi untuk melakukan pembaharuan.

c) Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat meningkatkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

d) Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi, serta berdampak meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

e) Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Adanya spesialisasi dan pembagian kerja dapat menciptakan peningkatan produktivitas. Pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh, sehingga setiap buruh menjadi lebih efisien.

f) Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya dapat mengubah pandangan, harapan, dan nilai sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui penyebaran pendidikan dan ilmu pengetahuan.

g) Faktor Manusia

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, namun lebih menekankan pada efisiensi dan produktivitas mereka. Diperlukan pelatihan dan program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan SDM.

h) Faktor Politik dan Administrasi

Struktur politik dan administrasi yang kuat, efisien dan tidak korupsi merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga diperlukan kebijakan pemerintah yang mendorong perekonomian.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a) Teori Pertumbuhan Endogen

Melalui tulisannya yang berjudul *Endogenous Technological Change* dan *The Origins of Endogenous Growth* tahun 1994, Michael Romer menggagas terbentuknya teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen merupakan pengembangan dari model Solow. Teori pertumbuhan endogen (*Endogeneous Growth Theory*) menyatakan bahwa investasi dalam

sumber daya manusia, inovasi, dan pengetahuan merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Prapanca dan Febriansyah,2019).

b) Teori Harrod-Domar

Teori ini menekankan pentingnya akumulasi modal pada proses pertumbuhan ekonomi, karena akumulasi modal atau investasi dapat menghasilkan pendapatan dan menambah kapasitas produksi. Model Harrod-Domar dapat dipakai untuk menganalisis pertumbuhan wilayah dengan memperhitungkan perpindahan modal dan tenaga kerja. Wilayah yang tidak memiliki tingkat tabungan tinggi, maka akan mendatangkan modal dan tenaga kerja dari wilayah lain agar dapat melakukan pertumbuhan yang cepat (Jamhadi,2009).

c) Model Pertumbuhan Solow

Model Solow merupakan pengembangan dari model pertumbuhan Harrod-Domar dengan menambahkan faktor tenaga kerja dan teknologi kedalam persamaan pertumbuhan. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bahwa salah satu faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi dengan menekankan pentingnya peranan investasi dalam proses akumulasi modal fisik. Dalam model pertumbuhan Solow, investasi fisik yang dilakukan pemerintah adalah investasi kapital public seperti jalan dan jembatan. Pembangunan infrastruktur

mendapatkan peranan penting dalam mendorong perekonomian suatu wilayah. Kemajuan akses infrastruktur akan memperlancar arus kegiatan perekonomian dalam suatu wilayah (Nugroho, 2009).

Menurut beberapa teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hal penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya manusia, akumulasi modal/investasi, serta kemajuan teknologi. Oleh karena itu, diharapkan adanya peningkatan pada hal tersebut agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dan bisa berdampak pada proses pembangunan.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia.

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (wikiapbn,2015). IPM dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. *The United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan masyarakat. Paling penting adalah pilihan untuk berumur panjang dan sehat, mendapat pendidikan yang cukup di nikmati standar hidup yang layak.

Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan

keempat komponen yaitu; angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (BPS Indonesia,2019).

2. Pengukuran dan Komponen- Komponen Indeks Pembangunan Manusia.

a. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan Manusia suatu Negara, yaitu:

- 1) Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
- 2) Tingkat pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah (dengan bobot dua per tiga) dan angka lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
- 3) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Pada tahun 2010, UNDP telah menyempurnakan metode tersebut dengan metode baru yaitu dengan mengganti komponen sebelumnya yaitu angka melek huruf menjadi angka harapan lama sekolah. Alasan mengapa angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah adalah bahwa angka melek huruf sudah tidak

efektif lagi karena angka tersebut sudah besar diseluruh Indonesia sehingganya sudah tidak efektif apabila masih menggunakan angka melek hidup (Arifin, 2017).

b. Komponen- Komponen Indeks Pembangunan Manusia.

1) Angka Harapan hidup

Penduduk adalah kekeyaan nyata suatu bangsa. Perkembangan penduduk baik secara kualitas maupun kuantitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak hanya sekedar berbicara pembangunan semata, tetapi juga haruspahaman tentang pembangunan yang berkualitas dengan resiko yang seminim mungkin dengan manfaat yang luar biasa bagimasyarakat. Kualitas hidup yang dimiliki suatu negara atau pun wilayah, menggambarkan kesejahteraan rakyat dan keberhasilan dari program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia. Terkait dengan kualitas hidup terdapat unsur angka harapan hidup (AHH) di dalamnya.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Menurut Statistik Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Menurut BPS bahwa angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat

ditempuh oleh seseorang selama hidup. Dengan demikian, indeks harapan hidup digunakan untuk mengukur usia rata-rata hidup penduduk. Standar yang digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir.

2) Tingkat Pendidikan.

Pembangunan dibidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah diakui bahwa pembangunan sumber daya manusia dalam suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengeksploitasi berbagai sumber daya serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang sangat penting bagi pembangunan sosial. Dengan demikian, peningkatan pendidikan suatu negara menjadi sangat penting artinya bagi pembangunan negara tersebut.

Proporsi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, baik terhadap total pengeluaran pembangunan maupun produk domestik bruto, secara tidak langsung menunjukkan reaksi pemerintah atas semakin tingginya permintaan atas sarana dan prasarana pendidikan. Melalui investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang di peroleh oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan yang akan mendorong

peningkatan produktifitas kerja seseorang, dan pada akhirnya seseorang yang memiliki produktifitas memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dan terhindar dari kemiskinan.

Penghitungan indeks pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

3) Standar Hidup Layak.

Peraturan mengenai standar hidup layak secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 27 Ayat 2 yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode *brass*, *varian trusset*)

berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Dalam cakupan luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Indeks ini menunjukkan berapa sesungguhnya tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya hingga mereka mampu menjalankan kehidupan ini secara layak. Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan GNP riil yang disesuaikan. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non-makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

2.1.5. Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan

ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di segala bidang ekonomi. (IPM) dapat diwujudkan melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kuncoro, 2013).

a. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi (Prasetya,2012).

Dalam satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta terhadap Gross National Product (GNP) semakin besar. Tetapi rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Sementara itu, Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Dumairy, 1997).

b. Teori Adolf Wagner.

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Adolf Wagner sendiri menamakannya sebagai Hukum Wagner yaitu hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (*The Law of Ever Increasing State Activity*). Hukum Wagner menjelaskan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relative pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Berkaitan dengan Hukum Wagner penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan

ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan (Prasetya,2012).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah.

Menurut Hipotesis Neoklasik yang dikemukakan oleh Douglas C North yang menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, modal yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda. Hipotesa Neoklasik merupakan dasar teoritis terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah. Dalam teori tersebut muncul sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal,2012).

Berdasarkan Hipotesis Neo-Klasik menjelaskan bahwa mobilitas faktor produksi, seperti modal dan tenaga kerja pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Sehingga, modal dan tenaga ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju dan ketimpangan pembangunan wilayah cenderung melebar. Namun, bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baik sarana dan prasarana, maka mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin lancar. Sehingga, setelah negara tersebut sudah maju, maka ketimpangan regional secara bertahap akan berkurang.

Sehingga, dari hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Kemudian, pada permulaan proses pembangunan, ketimpangan regional cenderung meningkat, tetapi setelah mencapai titik maksimum bila pembangunan dilanjutkan, maka ketimpangan wilayah akan berkurang.

Hal tersebut juga sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Adolf Wagner yang menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita menjadi salah satu alat ukur dalam menghitung Indeks Williamson sebagai ukuran ketimpangan pembangunan wilayah. Peningkatan pengeluaran pemerintah ini pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan wilayah melalui pendapatan perkapita. Berkaitan dengan teori ini penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni salah satunya meningkatnya fungsi pembangunan dan kesejahteraan.

Menurut Sjafrizal (2012) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah yaitu adanya perbedaan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, dan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan manusia di suatu daerah, serta alokasi dana pembangunan wilayah seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Peranan pemerintah yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah untuk alokasi dana pembangunan wilayah juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui permintaan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pembangunan manusia yang akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Pengeluaran pemerintah dapat menjadi faktor pendorong perekonomian melalui program atau kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pembangunan sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah. Menurut Agussalim (2009), Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan dengan proporsi yang memadai, dianggap sebagai salah satu strategi untuk mereduksi kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan biaya pendidikan dan kesehatan secara gratis dan meningkatkan akses penduduk miskin terhadap fasilitas sosial dan ekonomi sehingga dapat

memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Ketika suatu daerah memiliki sumber daya manusia yang sehat dan berpendidikan tinggi, maka hal ini akan berdampak pada produktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian, tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, serta berpengaruh terhadap pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Berdasarkan teori Rostow dan Musgrave yang memperkenalkan model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas manusia yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator pembangunan sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah (Prasetya,2012).

Sejalan dengan teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Adam Smith dimana pengeluaran atau investasi yang mengacu pada perluasan pendidikan, peningkatan kesehatan dan kualitas manusia lainnya dapat meningkatkan produktivitas melalui perbaikan kualitas

sumber daya manusia, alokasi pengeluaran pemerintah pada setiap daerah mutlak dibutuhkan dikarenakan pendidikan maupun kesehatan mutlak dibutuhkan, dikarenakan pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar bagi manusia (Hendarmin,2019). Sehingga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap berkurangnya ketimpangan pembangunan wilayah.

Hal tersebut juga sesuai teori Dornbusch dan Fisher yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan cerminan dari kebijakan fiskal yang merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian (Manik dan Hidayat, 2010 dalam Nurjanana, 2019). Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Seperti salah satu dari tujuan desentralisasi yaitu memperkecil disparitas antar daerah dengan mekanisme transfer dan memperbesar kewenangan daerah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki (UU No. 3 Tahun 2004). Oleh karena itu, dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang baru di daerah yang berskala kecil, dan kebijakan fiskal wilayah yang didukung penyelesaian masalah ketimpangan. Maka, dalam upaya penyelesaian masalah ketimpangan tersebut

diperlukan pengeluaran pemerintah yang terkoordinir dengan baik (Harun,2012).

Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia maka fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yaitu pemerataan pembangunan khususnya percepatan pembangunan di Kawasan Indonesia Timur dan memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di wilayah Indonesia timur dapat dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan wilayah.

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi faktor pendorong perekonomian melalui program atau kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk mendorong produktivitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah.

Hubungan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah juga dapat dilihat pada peran pemerintah dalam

bentuk pengeluaran pemerintah suatu daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Ketika pengeluaran pemerintah daerah dapat ditingkatkan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan, maka diharapkan pembangunan di daerah berjalan lancar. Contohnya yaitu belanja untuk peningkatan pelayanan publik, belanja bantuan sosial, belanja peningkatan infrastruktur, dan sebagainya. Sehingga dengan meningkatnya belanja pemerintah daerah, maka proses pembangunan berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan hal ini dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Pengeluaran pemerintah merupakan sebuah stimulus untuk dapat terus melakukan pembangunan ekonomi di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia pada setiap daerah secara merata akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah. Jadi, jika pembangunan terus berlanjut dan berangsur-angsur dilakukan maka dapat mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah.

2.2.2 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan ketika suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, maka dapat

dikatakan wilayah tersebut juga mampu melaksanakan pembangunan dengan baik. Namun, permasalahannya adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi sudah tersebar merata di setiap wilayah, atau hanya beberapa wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara merata, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta ketimpangan akan berkurang.

Menurut Sjafrizal (2012) pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat di daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam banyak. Hal ini dikarenakan daerah tersebut dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih sedikit. Daerah dengan kandungan sumber daya alam sedikit, maka biaya produksi barang dan jasa akan lebih tinggi dan daya saing menjadi lemah sehingga hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih lambat. Sehingga, adanya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang disebabkan oleh kandungan sumber daya alam dapat meningkatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Douglas C North dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dalam teori tersebut muncul sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Hipotesa ini kemudian dikenal dengan Hipotesa Neo-Klasik yang menjelaskan bahwa pada permulaan pembangunan suatu negara ketimpangan pembangunan cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut menuju titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut dan berangsur-angsur ketimpangan pembangunan tersebut akan menurun. Hipotesis ini juga menjelaskan bahwa kemajuan teknologi, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Jadi, berdasarkan hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa pada daerah dalam tahap awal pembangunan umumnya ketimpangan pembangunan wilayah cenderung meningkat tetapi setelah mencapai titik maksimum bila pembangunan terus dilanjutkan maka ketimpangan wilayah akan berkurang (Sjafrizal,2012).

Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pada pelaksanaannya bahwa pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan ketimpangan pembangunan pada setiap wilayah. Seperti yang dikemukakan oleh Myrdal (1957) pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses yang menyebabkan daerah maju semakin maju, sementara daerah tertinggal semakin terbelakang. Adanya perbedaan perkembangan dan kemajuan pada beberapa wilayah disebabkan oleh beberapa faktor seperti sumber daya yang dimiliki dan kondisi demografi setiap wilayah yang berbeda. Perbedaan seperti ini dapat menjadi penghambat dalam

pemerataan pembangunan karena terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di beberapa provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam seperti ini seharusnya dapat menjadi nilai tambah dalam pembangunan ekonomi dan dapat memberikan efek menyebar (*spread effect*). Namun pada kenyataannya kekayaan alam ini tidak dimiliki setiap provinsi secara merata sehingga menyebabkan kuatnya dampak balik (*backwash effect*). Hal inilah yang dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan wilayah (Kuncoro,2019).

Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan permasalahan yang sangat serius. Terdapat beberapa titik pertumbuhan dalam suatu wilayah, dimana kesempatan investasi , lapangan tenaga kerja dan upah buruh relatif lebih tinggi lebih banyak terdapat di pusat-pusat pertumbuhan dari pada daerah terbelakang. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak mampu untuk mengatasi masalah yang timbul akibat belum meratanya pembangunan dikarenakan juga terdapat beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi beberapa daerah yang lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Dalam teori *Trickling Down Effect-Polarization* yang dikemukakan oleh Hirschman (1958). Hirschman percaya bahwa pengaruh *Trickling Down* akan mengatasi pengaruh polarisasi. Misalnya, bila daerah perkotaan berspesialisasi pada produksi primer, maka meluasnya permintaan daerah perkotaan harus mendorong

perkembangan daerah pedesaan. Hirschman menyarankan untuk lebih banyak titik pertumbuhan agar dapat menciptakan dampak penyebaran pembangunan yang efektif.

Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan wilayah sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka dapat menimbulkan pembangunan wilayah yang semakin merata pula. Salah satunya yaitu dengan kebijakan otonomi daerah, dimana setiap daerah dituntut untuk mengelola sendiri potensi daerah yang dimilikinya secara tepat sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik serta pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

2.2.3 Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Permasalahan perbedaan indeks pembangunan manusia pada setiap daerah di Indonesia merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah. Seperti yang dikemukakan oleh Sjafrizal (2012) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah adalah salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan kondisi demografi ini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan serta perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan.

Secara teoretis ketimpangan antar wilayah awal mulanya dimunculkan oleh *Douglas C north* dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut muncul sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian dikenal dengan Hipotesa Neo-Klasik yang menjelaskan bahwa pada permulaan pembangunan suatu negara ketimpangan pembangunan cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut menuju titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut dan berangsur-angsur ketimpangan pembangunan tersebut akan menurun (Sjafrizal,2012).

Hipotesis Neo-Klasik menjelaskan bahwa mobilitas faktor produksi, seperti modal dan tenaga kerja pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Sehingga, modal dan tenaga ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju dan ketimpangan pembanguna wilayah cenderung melebar. Namun, bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baik sarana dan prasarana, maka mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin lancar. Sehingga, setelah negara tersebut sudah maju, maka ketimpangan regional secara bertahap akan berkurang. Sehingga, dari hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Kemudian, pada permulaan proses

pembangunan, ketimpangan regional cenderung meningkat, tetapi setelah mencapai titik maksimum bila pembangunan dilanjutkan, maka ketimpangan wilayah akan berkurang.

Baik tidaknya kinerja perekonomian tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi saja namun juga dapat dilihat dari taraf hidup masyarakatnya atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah (Thofan,2019). Jika IPM antar daerah tidak merata, maka akan berdampak pada pembangunan antar daerah. Jika IPM di suatu daerah lebih baik, maka daerah tersebut akan lebih maju dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu juga akan baik. Sebaliknya, jika IPM di suatu daerah rendah, maka hal ini akan menyebabkan daerah tersebut terbelakang. Adanya perbedaan inilah yang mendorong ketimpangan antar wilayah muncul.

Berdasarkan teori *human capital* yaitu pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah (Hendarmin,2019). Pendidikan memiliki peran penting dalam kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah. Dengan pendidikan, maka keterampilan dan kecerdasan masyarakat akan meningkat. Sehingga hal ini akan berdampak pada penggunaan tenaga kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Selain pendidikan, kesehatan juga berperan penting dalam pembangunan manusia di suatu daerah. Ketika suatu daerah memiliki

sumber daya manusia yang sehat dan berpendidikan tinggi, maka hal ini akan berdampak pada produktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian, tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, serta berpengaruh terhadap pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Sejalan dengan teori tersebut melalui tulisannya yang berjudul *Endogenous Technological Change dan The Origins of Endogenous Growth* di tahun 1994, Michael Romer menggagas terbentuknya teori pertumbuhan endogen. teori pertumbuhan endogen yang dipelopori oleh Michael Romer yang merupakan pengembangan dari Model Solow. Teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa investasi dalam sumber daya manusia, inovasi, dan pengetahuan merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan (Prapanca dan Febriansyah,2019). Berdasarkan teori ini dapat disimpulkan bahwa peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan dapat dikatakan sebagai bentuk investasi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Melalui pendidikan yang dapat memebrikan kesempatan bagi penduduk untuk dapat menguasai teknologi modern. Teknologi

yang berguna dalam hal peningkatan produktivitas atau efisiensi produksi. Tercapainya efisiensi dalam produksi tentu usaha dapat menguntungkan daerah yang menjadi lokasi produksi dimana pendapatan per kapita meningkat sehingga mampu bersaing dengan daerah lain dan dapat mengurangi ketimpangan wilayah.

2.3 Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul & Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Jaime Bonet (2006)	<i>Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence From The Colombian Experience</i> Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desentrasasi fiscal ▪ Aglomerasi ▪ Ketimpangan 	Regresi Data Panel Fixed Effect Model	Variabel desentralisasi fiscal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional
2	Michael Albert Baransano, dkk. (2016)	<i>Analysis of Factors Affecting Regional Development Disparity in the Province of West Papua.</i> Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> ▪ PDRB per Kapita ▪ Populasi ▪ Dana Perimbangan ▪ IPM 	Regresi Data Panel Fixed Effect Model	Ketimpangan di Provinsi Papua cenderung berfluktuasi. Variable PDRB per kapita, populasi, dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketimpangan Pembangunan 		pembangunan. Variabel IPM berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan
3	Kurt Geppert dan Andreas Stephan (2008)	<p><i>Regional Disparities in the European Union: Convergence and Agglomeration</i></p> <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendapatan per Kapita ▪ Aglomerasi 	Regresi data <i>Cross Section</i> dengan metode OLS	Konvergensi pendapatan perkapita menjadi lebih kuat, sehingga menyebabkan ketimpangan menurun. Penurunan ketimpangan hanya terjadi antar negara bukan antar wilayah di negara-negara Uni Eropa. Adanya aglomerasi pada kegiatan ekonomi menyebabkan kenaikan ketimpangan antar negara anggota Uni Eropa.
4	Lukman Harun dan Ghozali Maski (2018)	<p>Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)</p> <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengeluaran Pemerintah ▪ Pertumbuhan Ekonomi 	Regresi Data Panel dengan metode Random Effect Model (REM)	Variable pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan. Variable pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketimpangan 		signifikan terhadap ketimpangan.
5	Regita Dita Zusanti, Hadi Sasana, Rusmijati (2019)	<p>Analisis Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan TPT terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa 2010-2018</p> <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IPM ▪ TPT ▪ Pertumbuhan Ekonomi ▪ Ketimpangan 	Regrsi Data Panel dengan metode Random Effect Model	Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa tahun 2010-2018.

6	Rustianik Istiqomah (2018)	<p>Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Investasi (PMA) terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi (Studi Kasus di Pulau Jawa Tahun 2011-2016)</p> <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan ekonomi ▪ IPM ▪ Investasi ▪ Ketimpangan 	Regresi Data Panel dengan menggunakan model <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan IPM tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan.
7	Cindilia T Gabriel, Een N Walewangko, dan Dennij Mandei (2021)	<p>Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Dan Industri Pengolahan Sektor Perikanan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kota Bitung Tahun 2002 – 2020</p> <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan Ekonomi ▪ IPM ▪ Industry Pengolahan Sektor Perikanan ▪ Ketimpangan Pembangunan 	Regresi Robust Least Square	Secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Industri Pengolahan Sektor Perikanan Berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan dan secara parsial, Pertumbuhan Ekonomi berhubungan positif dan berpengaruh signifikan, Variabel IPM signifikan dan berhubungan negatif, sedangkan

				Variabel Industri Pengolah Sektor Perikanan tidak signifikan dan berhubungan negatif.
8	Ketut Wahyu Dhyatmika dan Hastarini Dwi Amati (2013)	<p>Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran</p> <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengeluaran pemerintah ▪ Tingkat pengangguran ▪ PMA ▪ Ketimpangan 	Analisis Regresi Data Panel Fixed Effect Model (FEM)	<p>Berdasarkan Tipologi Klassen, daerah maju cepat tumbuh adalah Kota Cilegon dan Kota Tangerang, daerah berkembang cepat adalah Kab. Tangerang, dan untuk daerah tertinggal adalah Kab. Pandeglang, Lebak, dan Serang. Variabel PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan, dan variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan.</p>

9	Safira, Sjamsu Djohan, Nurjanana	<p>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Infrastruktur ▪ Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan ▪ Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Kesehatan ▪ Pertumbuhan Ekonomi 	Analisis Linier Berganda	<p>Pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur berpengaruh signifikan dengan arah hubungan yang negatif.</p> <p>pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur berpengaruh signifikan dengan arah hubungan yang positif.</p> <p>Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh signifikan dengan arah hubungan yang positif.</p>
10	Muhammad Iqbal, Amsun Rifin, Bambang Juanda	<p>Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Provinsi Aceh.</p> <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wilayah ▪ Pembangunan Ekonomi ▪ Infrastruktur ▪ Ketimpangan 	Analisis Regresi Data Panel dengan menggunakan model Fixed Effect Model (FEM)	<p>Pengaruh Infrastruktur berengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan pembanguana ekonomi wilayah di Provinsi Aceh.</p>

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Dalam proses pembangunan setiap wilayah atau daerah pada umumnya mempunyai masalah yaitu ketimpangan pembangunan wilayah. Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan hal yang wajar terjadi karena adanya perbedaan sumber daya dan proses dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, pada setiap daerah biasanya terdapat daerah maju dan daerah terbelakang.

Douglas C North dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dalam teori tersebut muncul sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian dikenal dengan Hipotesa Neo-Klasik yang menjelaskan bahwa pada permulaan pembangunan suatu negara ketimpangan pembangunan cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut menuju titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut dan berangsur-angsur ketimpangan pembangunan tersebut akan menurun. Berdasarkan, hipotesa tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada negara-negara sedang berkembang atau daerah yang sedang

dalam tahap awal pembangunan umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara atau daerah maju yang tingkat ketimpangan pembangunan wilayah cenderung lebih rendah.

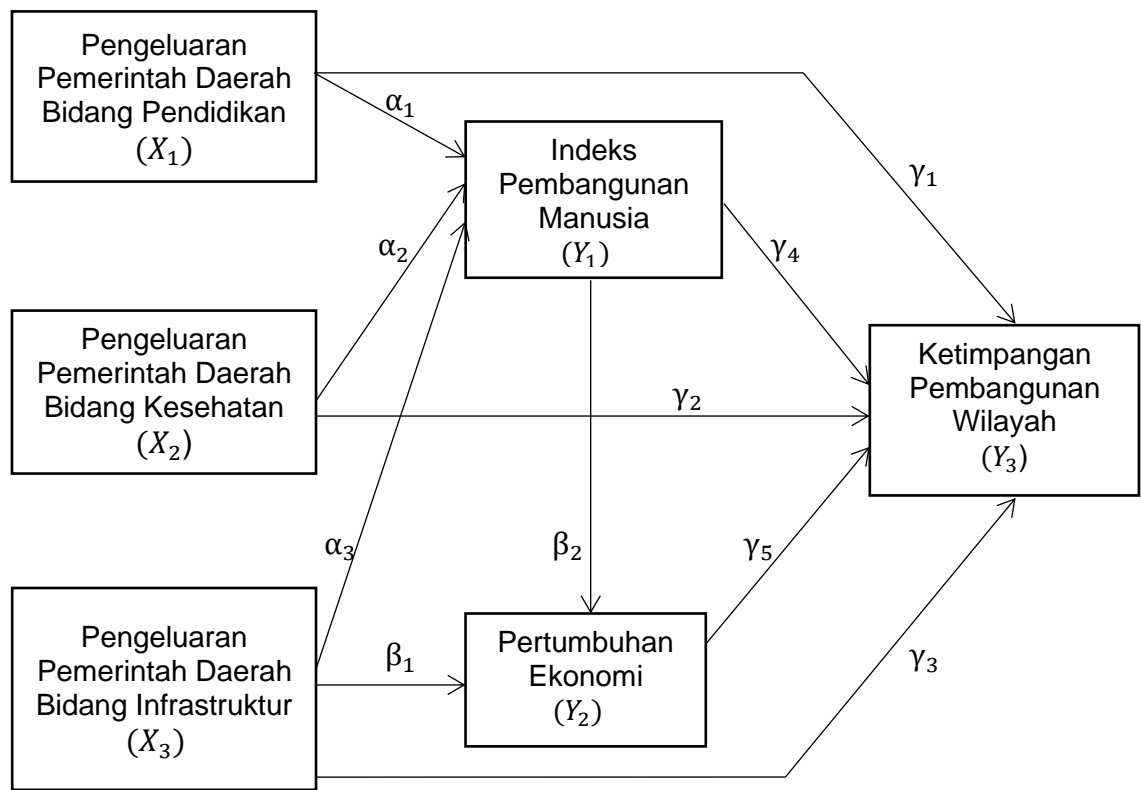
Menurut Sjafrizal (2012) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah yaitu adanya perbedaan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, dan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di suatu daerah, serta alokasi dana pembangunan wilayah seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Peranan pemerintah yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah untuk alokasi dana pembangunan wilayah juga merupakan faktor penting. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pembangunan manusia yang akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan dan perbaikan fasilitas pelayanan publik. Ketika suatu daerah memiliki sumber daya manusia yang sehat dan berpendidikan tinggi, maka hal ini akan berdampak pada produktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian,

tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, serta berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan wilayah.

Teori Rostow dan Musgrave memperkenalkan model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas manusia yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator pembangunan sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah.

Kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antar variabel berdasarkan teori-teori yang mendukung penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur ekonomi dasar memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah. Maka, disusun kerangka konsep penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

3.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia.

2. Diduga pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia.
3. Diduga pengeluaran pemerintah daerah bidang infrastruktur berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia.
4. Diduga pengeluaran pemerintah daerah bidang infrastruktur berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.
5. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.
6. Diduga pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.
7. Diduga pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.
8. Diduga pengeluaran pemerintah daerah bidang infrastruktur berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.
9. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.

10. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.